

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar belakang**

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan dan pengurangan kemiskinan merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, peran pemerintah sangatlah vital dalam upaya mengejar pertumbuhan ekonomi. Setidaknya pemerintah dapat mempengaruhi jalannya perekonomian melalui instrumen kebijakan fiskal seperti kebijakan perpajakan, pengeluaran pemerintah, mengatasi kegagalan pasar, dan penyediaan barang dan jasa publik. Di negara berkembang dengan kelembagaan yang lemah, tanpa adanya peran pemerintah dalam mengatur perekonomian sangat mungkin perekonomian dalam negeri akan sangat timpang karena hanya dikuasai pihak swasta yang kuat.

Dalam kaitannya dengan pengeluaran pemerintah, beberapa ekonom berpendapat belanja pemerintah dapat berguna dalam merangsang permintaan agregat di dalam perekonomian yang cenderung stagnan dan mengurai kejenuhan yang ditimbulkan oleh sektor swasta. Kaum Keynesian berargumen pengeluaran pemerintah dapat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi jika pihak swasta menyediakan dana yang dapat dipinjam oleh pemerintah yang akan dikembalikan melalui berbagai macam rancangan program pemerintah seperti pembangunan infrastruktur. Skema pengeluaran pemerintah semacam ini akan menciptakan multiplier ekonomi melalui agregat permintaan yang ditimbulkan.

Ekonom yang lain berpendapat bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah di luar ini memiliki efek negatif pada pertumbuhan ekonomi (Mitchell, 2005). Untuk mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat maka pemerintah harus mengurangi alokasi belanja kurang produktif dan berusaha menjaga agar pemerintah sendiri tidak menjadi sumber utama misalokasi belanja (Tanzi, 1994). Buchanan (1975) dan Buchanan & Musgrave (1999) dalam Prasetyo & Zuhdi (2013) menolak intervensi pemerintah dalam pasar karena khawatir akan menyebabkan inefisiensi pilihan publik dalam pasar swasta yang sedang berkembang. Sedangkan Tanzi (2005) dalam Prasetyo & Zuhdi (2013) bersikap lebih lunak dengan menyarankan peranan pemerintah sebaiknya dibatasi dalam mengoreksi kesalahan-kesalahan pasar serta mengatasi kegagalan pasar, bukan berperan menggantikan pasar itu sendiri.

Lebih jauh dukungan kepada pendapat yang menolak intervensi pemerintah dalam perekonomian dikemukakan oleh Jean Baptiste Say. Say berpendapat bahwa penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri (Deliarnov, 2007). Sebagai imbas dari pendapat Say tersebut, perekonomian abad ke-20 diwarnai perlombaan antar perusahaan untuk memproduksi barang sebanyak-banyaknya namun tidak diikuti oleh tingkat permintaan yang sepadan. Pada tahun 1930 terjadilah *Great Depression* yang tidak hanya memukul perekonomian, namun juga mematahkan pendapat Say tersebut. Krisis tersebut menyebabkan tingginya tingkat pengangguran yang belum pernah dialami sebelumnya sebagai akibat pemutusan hubungan kerja dikarenakan banyaknya barang produksi yang tidak laku akibat adanya permintaan.

Sebagai akibat dari krisis ekonomi tersebut, para ekonom mulai mencari jawaban lain karena ekonom klasik dan neo-klasik tidak mampu memberikan solusi. Salah satu ekonom yang ikut mengkritisi pandangan kaum klasik adalah John Maynard Keynes. Keynes dalam kritiknya kepada teori ekonomi klasik menyebut kelemahan teori klasik yang terlalu bertumpu kepada analisa mikro (Deliarnov, 2007). Keynes berpendapat bahwa determinan seluruh aktivitas perekonomian terletak pada permintaan agregat sehingga kurangnya permintaan agregat akan memicu terjadinya pengangguran yang disebabkan oleh lesunya kondisi perekonomian. Pada saat inilah intervensi pemerintah diperlukan untuk menstabilkan kontraksi siklus aktivitas ekonomi. Untuk mencegah pengaruh buruk resesi dan depresi ekonomi yang berlarut-larut, Keynes menyarankan pemerintah merumuskan kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal dapat ditempuh pemerintah melalui dua pendekatan yaitu: *income approach* melalui penetapan pajak dan *expenditure approach* melalui pengeluaran. Masih menurut Keynes, perekonomian akan tumbuh dengan baik jika pemerintah mampu memainkan kebijakan fiskal ini dengan baik (Mankiw, 2013).

## **1.2. Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah**

Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, peran pemerintah masih sangat besar baik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Tanpa mengecilkan pentingnya kebijakan moneter, kebijakan fiskal pemerintah yang terdiri dari kebijakan perpajakan, pengeluaran pemerintah, dan menyediakan berbagai macam barang publik, turut menjadi instrumen pendukung yang kokoh dan penting dari pertumbuhan ekonomi di negara-negara tersebut. Hal ini tidak terlepas dari fakta di lapangan bahwa selama ini peranan

swasta dalam penyediaan layanan dan fasilitas publik serta infrastruktur sangat terbatas.

Dalam era otonomi daerah dengan kebijakan desentralisasi fiskal yang menjadi salah satu instrumennya, peran pemerintah, terutama pemerintah daerah menjadi semakin penting. Alokasi pengeluaran pemerintah untuk layanan sektor publik memegang peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi. Tiebout (1956) dan Oates (1972) dalam Davoodi dan Zou (1998) menyampaikan bahwasanya pelayanan publik yang paling efisien akan dicapai oleh level pemerintahan yang berada paling dekat dengan warga. Hal ini setidaknya disebabkan oleh (i) pemerintahan daerah lebih memahami kondisi warga masyarakat di bawahnya, (ii) pemerintah daerah dapat merespons fenomena/informasi terbaru yang ada di masyarakat dengan lebih cepat sehingga akan mendorong efisiensi penggalan informasi serta (iii) pemerintah daerah akan saling berkompetisi untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik sehingga akan memicu *disruptive innovation* di bidang layanan publik.

Sebagaimana ditunjukkan oleh Musgrave & Rostow, ditemukan adanya hubungan antara perkembangan pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi yang diamati pada tiap-tiap tahap pertumbuhan ekonomi yaitu pada tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Sedangkan Todaro & Smith (2012) berpendapat bahwa modal sumber daya manusia dalam pembangunan ekonomi tidak kalah penting apabila dibandingkan dengan modal fisik. Modal sumber daya manusialah yang mampu menentukan apa dan bagaimana modal fisik yang diperlukan bagi pembangunan ekonomi harus disediakan. Modal

sumber daya manusia ini dapat dikembangkan melalui penyediaan pendidikan dasar yang layak serta kesehatan jasmani dan rohani yang memadai.

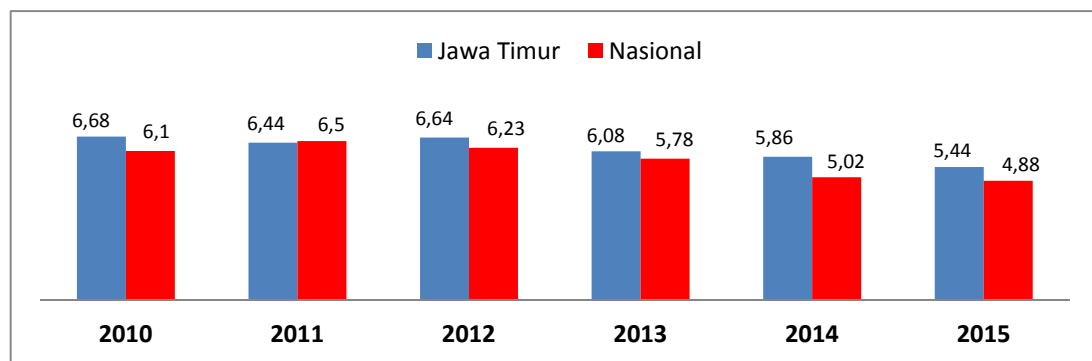
Dalam proses penyediaan kedua barang publik ini, diperlukan infrastruktur yang baik untuk memastikan keduanya dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Terutama di wilayah-wilayah yang masih banyak terdapat masyarakat miskin. Kemiskinan dan ketiadaan infrastruktur yang memadai akan menyebabkan akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan sangat terbatas. Hal ini tentunya akan bersifat kontraproduktif bagi ketersediaan sumber daya manusia berkualitas yang dibutuhkan bagi upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Disini dibutuhkan peran pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas modal manusia melalui pengalokasian anggaran belanja bagi pendidikan & kesehatan serta pembangunan infrastruktur.

### **1.3. Fenomena Di Propinsi Jawa Timur**

Jawa Timur sebagaimana propinsi-propinsi di Pulau Jawa lainnya, selama ini dikenal sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang termaju. Jawa Timur memiliki posisi strategis ditinjau dari dari aspek ekonomi maupun dari sisi demografisnya. Dari sisi ekonomi, selama ini Jawa Timur dikenal sebagai penghubung (*hub*) antara Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Barat Indonesia. Hal ini tidak lepas dari infrastruktur yang mendukung seperti keberadaan Pelabuhan Tanjung Perak yang merupakan pelabuhan terbesar kedua di Indonesia. Dari segi demografis, letak Jawa Timur yang berada di tengah-tengah kepulauan Nusantara memungkinkan wilayah ini mudah dijangkau dan mudah menjangkau pulau-pulau Sumatera, Borneo, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Sebagai wilayah yang strategis dari segi ekonomi, Jawa Timur mempunyai peluang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui pembangunan daerah terutama di bidang-bidang yang mampu mendukung tercapainya hal tersebut. Sejak beberapa tahun yang lalu, Jawa Timur membangun kawasan Gerbang Kertasusila yang bertujuan untuk menggerakkan dan menjadi kontributor pembangunan ekonomi Jawa Timur. Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi di daerah dapat dilihat dari pertumbuhan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik atas dasar harga berlaku maupun berdasarkan atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2010 sampai dengan 2015 berhasil melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebagaimana tergambar dari grafik di bawah ini:

**Gambar 1.1**  
**Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Jawa Timur dan Nasional**  
**2010-2015 (dalam persen)**



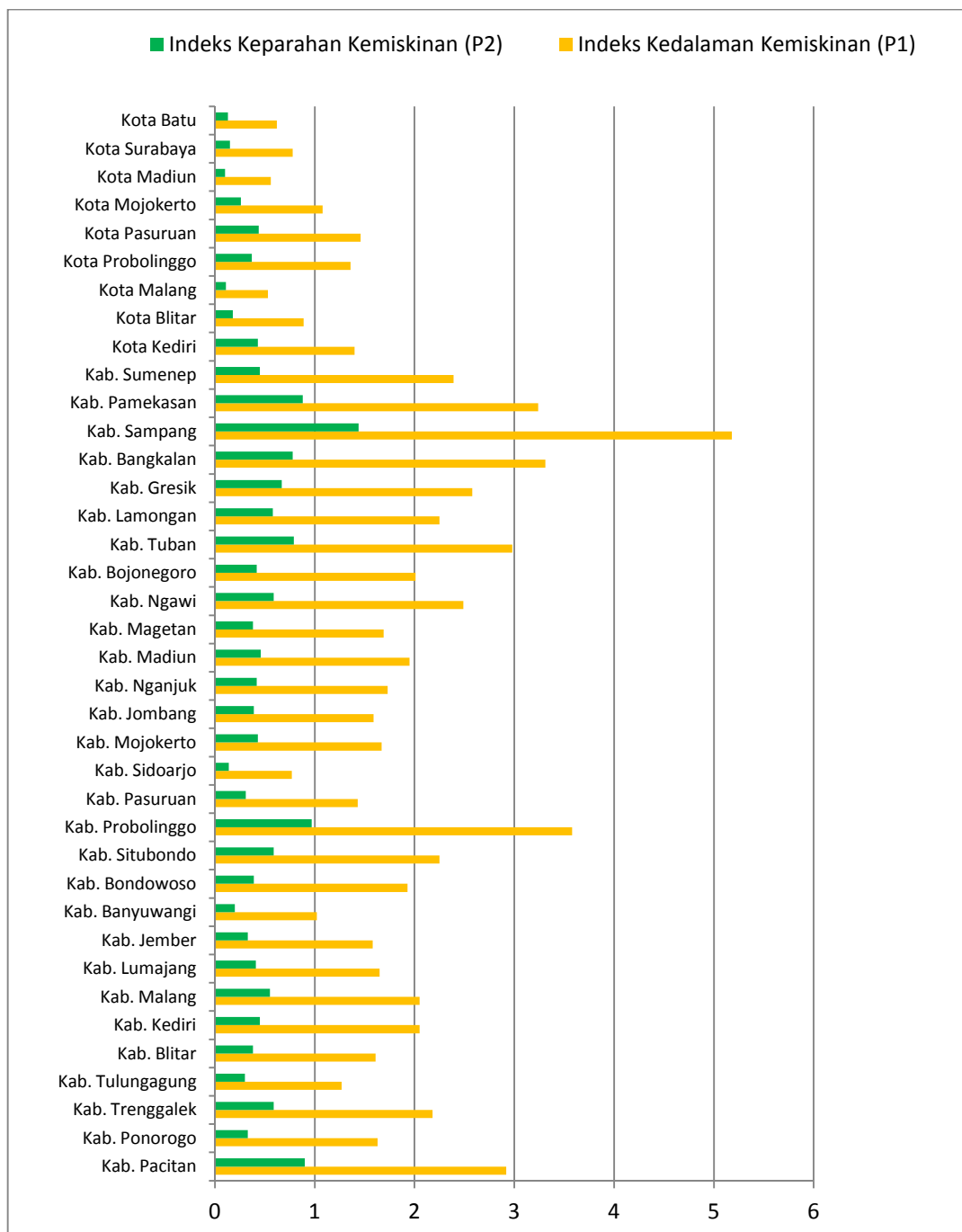
Sumber: Bappenas, 2017 (diolah)

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Timur hampir selalu berada diatas rata-rata nasional. Propinsi Jawa Timur mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 6,68 persen pada tahun 2010. Angka pertumbuhan ini kemudia menurun sebesar 0,24 persen pada tahun 2011 menjadi 6,44 persen. Pada tahun 2012 angka pertumbuhan meningkat lagi menjadi 6,64 persen atau mengalami kenaikan 0,2 persen. Mulai tahun 2013 tercatat angka

pertumbuhan ekonomi terus menurun menjadi 6,08 persen pada 2013, kemudian menjadi 5,86 persen pada 2014 dan 5,44 persen di tahun 2015. Apabila dibandingkan, maka hanya sekali Jawa Timur berada di bawah rata-rata angka pertumbuhan ekonomi nasional yaitu pada tahun 2012.

Menarik untuk dicermati walaupun angka pertumbuhan ekonomi hampir selalu berada diatas nasional, namun angka kemiskinan di Jawa Timur relatif masih tinggi. Menurut BPS, kemiskinan tidak cukup ditunjukkan dengan angka dan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan dapat ditunjukkan melalui cara lain yaitu indeks kedalaman kemiskinan atau sering dikenal sebagai P1 dan juga indeks keparahan kemiskinan atau P2. Dengan demikian akan didapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai penduduk miskin di suatu wilayah. Secara singkat Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan (Badan Pusat Statistik, 2017). Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin (Badan Pusat Statistik, 2017). Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Data P1 dan P2 di masing-masing kabupaten/kota di Propinsi Jawa Timur pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

**Gambar 1.2**  
**Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan**  
**Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)**  
**Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur Tahun 2015**



Sumber: Bappenas, 2017 (diolah)

Dari grafik terlihat masih banyak terdapat kabupaten/kota di Propinsi Jawa Timur dengan indeks P1 mendekati dan berada diatas angka 2. Dengan



kriteria bahwa semakin tinggi angka indeks maka semakin jauh pula dari garis kemiskinan, dapat dikatakan mayoritas penduduk Jawa Timur masih berada di bawah garis kemiskinan. Demikian juga banyaknya angka indeks P2 yang mendekati atau berada diatas angka 1 menunjukkan bahwa ketimpangan antar penduduk miskin juga masih tinggi. Data diatas menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang menanti pemerintah daerah baik di tingkat kabupaten/kota maupun pemerintah propinsi untuk menekan dan mengurangi angka kemiskinan di Jawa Timur. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat memacu pertumbuhan ekonomi.

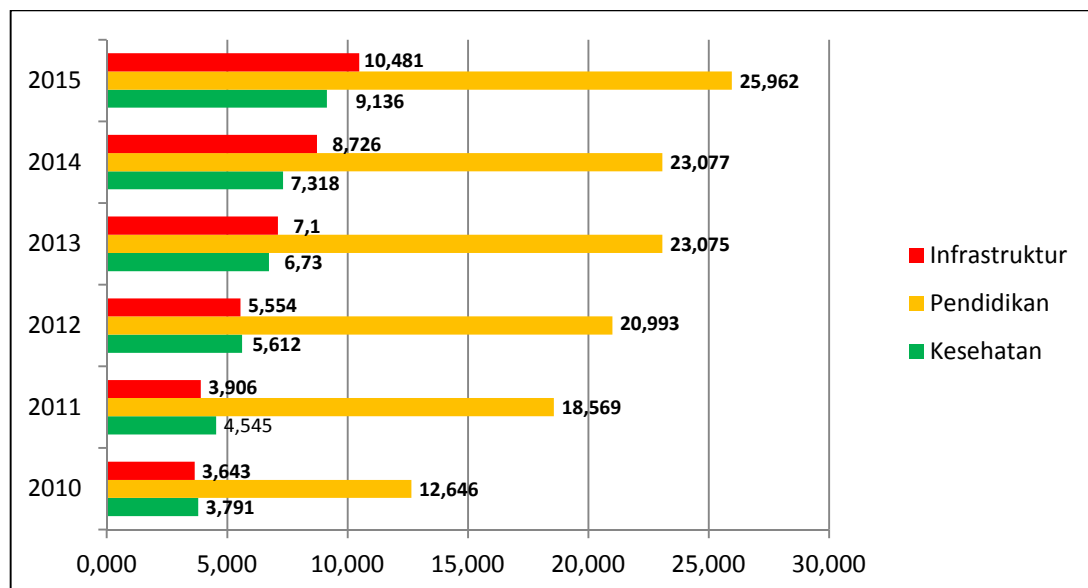
Sebagaimana dipaparkan diatas, peran pemerintah dalam memacu pertumbuhan ekonomi salah satunya adalah dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diwujudkan berupa alokasi anggaran pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Laporan dari *IMD World Talent Report 2016* menunjukkan bahwa tingkat daya saing SDM Indonesia berada di peringkat 44 dari 61 negara. Peringkat ini menurun dari tahun 2015 dimana Indonesia masih berada di peringkat 41. Salah satu aspek yang dinilai dalam pemeringkatan ini adalah pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan. Dari sini dapat dinilai investasi pemerintah melalui belanja pendidikan dan kesehatan belum membuahkan hasil yang menggembirakan. Pada sisi lain dapat dilihat bahwa dukungan pemerintah dalam bidang pendidikan dan kesehatan sangat penting dalam meningkatkan daya saing dan kualitas SDM.

Apabila ditarik garis antara peran pemerintah dan pelaksanaan otonomi daerah, maka penyediaan sarana pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur tidak lagi menjadi monopoli dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah pun

mempunyai kepentingan yang sama dalam upaya meningkatkan kualitas SDM di daerahnya. Untuk itu pemerintah daerah diharuskan mengalokasikan anggaran untuk belanja urusan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur sebagai wujud nyata penyediaan layanan publik di daerahnya. Terutama dengan kebijakan baru dari Menteri Keuangan Republik Indonesia yang menentukan bahwa pemerintah daerah harus menyediakan porsi dalam persentase tertentu untuk belanja pendidikan dan kesehatan.

Pada periode waktu selama 6 tahun dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 tercatat pengeluaran pemerintah daerah di Propinsi Jawa Timur menunjukkan tren meningkat. Selengkapnya sebagaimana disajikan dalam grafik dibawah ini:

**Gambar 1.3**  
**Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur**  
**untuk Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur**  
**Tahun 2010-2015 (dalam triliun rupiah)**



Sumber: Kementerian Keuangan, 2016 (diolah)

Pada tahun 2010 total belanja sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur seluruh pemerintah kabupaten/kota di Propinsi Jawa Timur

mencatatkan angka sebesar 19,748 triliun rupiah dan pada tahun 2015 tercatat sebesar 45,579 triliun rupiah atau mengalami peningkatan sebesar 130 persen. Pengeluaran pemerintah kabupaten/kota sektor pendidikan mengalami peningkatan sebesar 151 persen dari 3,634 triliun rupiah pada tahun 2010 menjadi 9,136 triliun rupiah pada tahun 2015. Sedangkan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan mencatatkan peningkatan sebesar 108,2 persen dari sebelumnya tercatat 12,472 triliun rupiah pada tahun 2010 menjadi 25,962 triliun rupiah pada tahun 2015. Untuk belanja pemerintah daerah di sektor infrastruktur, pada tahun 2010 tercatat sebesar 3,643 triliun rupiah sedangkan pada tahun 2015 tercatat sebesar 10,481 triliun rupiah dengan persentase kenaikan sebesar 118 persen. Terkait perkembangan pertumbuhan ekonomi dan belanja publik di Propinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 2010-2015, menarik untuk mencermati Wagner dalam Wu et. al. (2010) yang berpendapat bahwa pengeluaran pemerintah bersifat elastis terhadap pertumbuhan ekonomi. Sehingga apabila pertumbuhan ekonomi meningkat, maka pengeluaran pemerintah juga akan semakin besar.

Keterkaitan antara pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi telah menarik minat banyak peneliti untuk melakukan studi selama bertahun-tahun. Hasilnya pun menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Lofgren dan Robinson (2004) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pertanian memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Katrakilidis & Tsaliki (2008) melakukan penelitian mengenai hubungan antara belanja pemerintah berpengaruh kepada

pertumbuhan ekonomi di Yunani. Hasilnya menunjukkan bahwa belanja pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Yunani pada kurun waktu 1958-2004. Attari dan Javed (2013) menemukan hal yang serupa yaitu bahwa pengeluaran pemerintah Pakistan di bidang pembangunan antara tahun 1980-2010 memberikan eksternalitas positif kepada pertumbuhan ekonomi.

Di Indonesia, penelitian dari Haryanto (2012) memberikan hasil bahwa pengeluaran belanja langsung dan belanja tidak langsung serta gabungan kedua jenis belanja tersebut berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah periode 2007-2011. Hasil serupa ditemukan oleh Putra dan Adigorim (2010) yang juga mencermati pengaruh belanja langsung dan tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dengan hasil bahwa kedua jenis belanja ini berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu hasil yang menunjukkan pengeluaran pemerintah tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi ditemukan oleh Fan, dkk. (2000). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah yang terbagi di bidang irigasi, tanah, air, kesehatan, dan pembangunan komunitas pedesaan memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan alokasi anggaran belanja dari tahun ke tahun selalu dilakukan namun belum mampu mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Haryanto (2012), Lofgren & Robinson (2004) dan Fan (2000) ditemukan *research gap* bahwa pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh yang berbeda-beda terhadap pertumbuhan

ekonomi. Kondisi ini menarik perhatian penulis untuk meneliti hubungan antara pengeluaran pemerintah daerah khususnya di Propinsi Jawa Timur terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebagai pelengkap *research gap* pengeluaran pemerintah di dalam penelitian ini menggunakan jenis belanja yang juga dipergunakan oleh Lofgren & Robinson (2004) yaitu belanja publik sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dengan periode penelitian yang lebih baru (2010-2015). Jenis belanja ini dipilih dengan pertimbangan bahwa ketiganya berperan besar bagi perbaikan kualitas sumber daya manusia yang merupakan salah satu modal penting bagi terwujudnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu ketiga jenis belanja diatas juga termasuk belanja produktif (Bleaney et. al., 2000). Lokasi dalam penelitian ini akan dibagi menjadi kabupaten/kota dengan indeks kapasitas fiskal (IKF) tinggi dan kabupaten/kota dengan indeks kapasitas fiskal (IKF) rendah. Angka Indeks Kapastitas Fiskal ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah untuk melakukan pengeluaran non-belanja pegawai setelah dikurangi jumlah penduduk miskin di wilayah tersebut. Sehingga angka indeks kapasitas fiskal sekaligus menunjukkan bagaimana angka kemiskinan akan mempengaruhi layanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah. Hal ini disebabkan kapasitas fiskal pemerintah daerah akan berpengaruh kepada pengeluaran pemerintah daerah tersebut baik secara langsung maupun secara tidak langsung (Simanjuntak & Mukhlis, 2014).

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka penulis membuat penelitian ini dengan judul **“Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Publik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Jawa Timur Tahun 2010-2015 (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota dengan IKF Tinggi dan IKF Rendah)**

#### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka terdapat beberapa hal yang dapat dirumuskan sebagai permasalahan yang dijadikan landasan untuk penelitian lebih lanjut, yaitu:

1. Bagaimanakah pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan bagi terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah dengan kapasitas fiskal tinggi dan kapasitas fiskal rendah?
2. Bagaimanakah pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah dengan kapasitas fiskal tinggi dan kapasitas fiskal rendah?
3. Bagaimanakah pengaruh pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah dengan kapasitas fiskal tinggi dan kapasitas fiskal rendah?
4. Bagaimanakah elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur di daerah dengan kapasitas fiskal tinggi dan kapasitas fiskal rendah?

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah dengan kapasitas fiskal tinggi dan daerah dengan kapasitas fiskal rendah;

2. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah dengan kapasitas fiskal tinggi dan daerah dengan kapasitas fiskal rendah;
3. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah dengan kapasitas fiskal tinggi dan daerah dengan kapasitas fiskal rendah;
5. Untuk menganalisis elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur di daerah dengan kapasitas fiskal tinggi dan kapasitas fiskal rendah.

#### **1.6. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Pemerintah Daerah  
Untuk bahan wacana terhadap kondisi yang dideskripsikan dalam penelitian ini serta sebagai bahan pertimbangan penyusunan kebijakan di masa yang akan datang.
2. Bagi Dunia Pendidikan  
Untuk tambahan referensi serta sebagai kontribusi dalam pelaksanaan penelitian-penelitian serupa di masa yang akan datang.